

Judul : Antisipasi kemarau panjang, Senayan minta pemerintah percepat langkah mitigasi
Tanggal : Kamis, 06 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Antisipasi Kemarau Panjang **Senayan Minta Pemerintah Percepat Langkah Mitigasi**

Senayan meminta Pemerintah segera mengambil langkah antisipatif agar dampak musim kemarau tidak semakin meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memberi informasi buat mitigasi sebelum masyarakat merasakan dampak yang lebih berat.

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratomoko mengatakan, informasi dari BMKG kudu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. "Jangan sampai Pemerintah baru bergerak ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hasil panen menurun, atau kebakaran hutan dan lahan mulai meluas," katanya di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Sebelumnya, BMKG memperingatkan, fenomena El Niño diperkirakan akan bertahan hingga awal kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang melampaui kategori kuat. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, meningkatkan risiko kekeringan, serta memicu lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Singgih melanjutkan, penanganan ancaman kekeringan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda), BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian terkait,

TNI-Polri, hingga relawan kebencanaan. "Upaya pencegahan akan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi," kata politisi Golkar ini.

Dia mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) mengantisipasi dampak kemarau terhadap produksi pangan, sementara Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemda memastikan kelompok rentan memperoleh bantuan apabila terdampak kekeringan berkepanjangan.

Selain itu, Singgih mengingatkan kewaspadaan terhadap meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Patroli rutin, edukasi kepada masyarakat, serta pemantauan kawasan rawan perlu menjadi fokus utama agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.

Singgih menegaskan, manusia tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi bisa mengendalikan kesiapsiagaan. "Dengan mitigasi yang baik, koordinasi yang solid, dan respons cepat, dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat ditekan



Singgih Januratomoko

semaksimal mungkin," harap legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Senada, anggota Komisi IV DPR Rina Saadah meminta Pemerintah segera mengambil langkah mitigasi cepat untuk mengatasi ancaman krisis air di sejumlah sentra pertanian. Kegagalan menjaga pasokan air selama musim tanam tidak hanya berisiko memicu gagal panen massal, tetapi juga mengancam stabilitas pangan nasional.

Rina mengingatkan, dampak krisis air bersifat sistemik. Mulai dari pembengkakan biaya produksi, hilangnya sumber penghasilan buruh tani, hingga ancaman lonjakan harga pangan akibat penurunan produktivitas.

Dia mengaku mendapat laporan

dari sejumlah daerah mengenai ancaman krisis air pada musim tanam. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena air merupakan kebutuhan paling mendasar dalam proses budidaya pertanian. "Jangan sampai krisis air berubah menjadi krisis kesejahteraan bagi para petani," tandas Rina di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dia mendesak Pemerintah segera menyalurkan bantuan air darurat untuk menyelamatkan tanaman yang terancam kekeringan. Dia juga menuntut adanya akselerasi pembangunan infrastruktur jangka panjang. Seperti rehabilitasi jaringan irigasi sekunder dan tersier, penambahan jumlah embung, pembuatan sumur bor di wilayah potensial, serta pemasangan jaringan perpipaan ke lahan pertanian.

Selain itu, Rina mendorong koordinasi lintas sektoral antara Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemda, dan kelompok tani agar pemetaan wilayah rawan kekeringan dapat dilakukan secara proaktif. Harapannya sistem pemetaan dini mampu mencegah kerugian petani sebelum kerusakan tanaman terjadi secara masif.

"Pemerintah diminta bekerja secara ekstra, karena ancaman kekeringan tahun ini lebih panjang daripada tahun-tahun sebe-

lumnya," imbau politisi PKB ini.

Sementara itu, Deputy Bidang Klimatologi BMKG Ardhassena Sopaheluwakan mengingatkan, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Fenomena El Niño juga akan terus bertahan hingga awal tahun 2027, dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen.

"Dampak El Niño sangat bergantung pada bagaimana kondisi panasnya laut di sekitar wilayah Indonesia. Jadi tidak serta-merta akan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Ardhassena di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, potensi kombinasi El Niño dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif yang diperkirakan muncul pada September hingga Desember 2026. Hal ini dapat memperparah kondisi kekeringan di berbagai daerah.

Untuk itu, ia mengimbau sektor pertanian untuk menyesuaikan pola tanam. Caranya dengan memilih varietas tahan kekeringan, pengelola sumber daya air, memperkuat kesiapan infrastruktur, serta Pemda meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko karhutla dan penurunan kualitas udara. ■ TIF